

## **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI PAUD NDASARI BUDI KRAPYAK YOGYAKARTA**

**Nur Tanfidiyah**

*Pendidikan Islam AnakUsia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
n.tanfidiyah@gmail.com*

### **ABSTRACK**

*Funding factor is very important to increase quality of education actually for early childhood education as basic foundation of success for the next stage of education level. Related to the above description, this study aimed to describe the funding for early childhood education. Research methods used in this research is qualitative method and case studies approach in PAUD nDasari Budi Yogyakarta. The study results show that funds to early childhood education in PAUD nDasari Budi Krapyak Yogyakarta coming from central goverment and the regions, community, and personal. This school never receive funds from the agency or business world.*

**Key word:** *funding management, early childhood*

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki pengaruh besar dalam pembangunan suatu negara, sebab dipercaya oleh masyarakat sebagai jalan ampuh mencerdaskan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tunas-tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan. Upaya pembangunan negara dengan mencerdaskan sumber daya manusia bukan sesuatu yang instan, bahkan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang tepat dengan memulainya sejak anak usia dini. Adapun anak usia dini adalah masa keemasan (*golden age*) di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga perlu diperhatikan demi menunjang keberhasilan di masa mendatang.

Sejalan dengan hal di atas, untuk menumbuhkan generasi yang berkualitas diperlukan lembaga pendidikan yang turut mendukung. Adapun lembaga pendidikan yang bagus sangat berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses pendidikan di sekolah/madrasah. Sebagaimana dikutip oleh Junaidi Achmad, bahwa teori hubungan dengan biaya dengan *output* dikemukakan oleh John, Edgar, dan Kern. Mereka mengungkapkan bahwa biaya dengan kualitas

serta kuantitas pendidikan memiliki keterkaitan. Dalam sistem sekolah, peningkatan *enrollment* 10% akan meningkatkan biaya mendekati proporsi yang sama serta meningkatkan kualitas sebagai konsekuensi biaya artinya biaya mempengaruhi kualitas pendidikan, hanya saja dapat juga tidak ada keterkaitan (Diding dan Imam, 2016: 193). Sejalan dengan pernyataan tersebut, biaya mejadi faktor penting kelancaran jalannya proses pendidikan. Melalui uang sarana dan prasarana, administrasi dan lain sebagainya dapat tersedia di sekolah. Selain itu, pembiayaan juga menyangkut kesejahteraan pendidik, yaitu gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **B. METODE PENELITIAN**

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan anak usia dini di PAUD nDasari Budi Krapyak Yogyakarta adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi kemudian menganalisisnya dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiono, 2014: 15). Adapun penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan triangulasi teknik.

## **C. KAJIAN TEORI**

Pendidikan anak usia dini (*early childhood education*) merupakan suatu disiplin ilmu pendidikan yang secara khusus memperhatikan, menelaah, dan mengembangkan berbagai interaksi edukatif antara anak usia dini dengan pendidik untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan potensi anak secara optimal (Wiyani dan Banawi, 2012: 46). Pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang merupakan masa keemasan "*golden age*". Pada masa ini anak-anak masih sangat rentan, yang apabila menanganinya tidak tepat justru dapat merugikan anak tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Adapun pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi anak untuk lebih memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, maupun sosial atau emosional dalam rangka memasuki jenjang pendidikan lanjut (Wahyuni, 2012:2).

Dengan kata lain PAUD merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat fundamental, juga sebagai kerangka dasar terbentuknya dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak (Purnamasari dkk, 2014:2).

### **Pengertian Manajemen Pembiayaan**

Manajemen pembiayaan (*financial managemen*) adalah segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Secara historis, manajemen pembiayaan ini juga pernah mengalami perkembangan. Pada tahun 1940-1950-an, misalnya manajemen ini mulai dipelajari secara lebih luas dan kemudian mengalami pembaharuan pada tahun 1970-an awal abad 21 (Mulyono, 2010: 180-181). Pembaharuan pembiayaan tersebut juga berkaitan dengan kondisi negara.

Senada dengan penjelasan di atas, manajemen pembiayaan juga diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan/pembiayaan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. Sedangkan anggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Tim dosen UPI, 2013: 256-258).

Penyelenggaraan kegiatan di lingkungan suatu organisasi kerja, baik yang bersifat manajemen administratif maupun manajemen operatif, sangat memerlukan penyediaan sejumlah dana. Kegiatan pengelolaan dana memerlukan pula kegiatan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, kontrol, komunikasi, dan bahkan juga ketatausahaan. Terkait dengan itu, manajemen pembiayaan terkait dua aspek. *Pertama*, manajemen pembiayaan dalam arti sempit. Pada aspek ini manajemen pembiayaan mengandung pengertian segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi berupa tata usaha atau pembukuan keuangan. *Kedua*, manajemen pembiayaan dalam arti luas. Manajemen mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan (Mulyono, 2010: 180-181).

Salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat

mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah membutuhkan biaya tertentu *Jer basuki mawa bea*. Untuk itu, manajemen keuangan perlu dilakukan sebaik-baiknya agar kegiatan yang lain bisa terlaksana dengan lancar (Minarti, 2016: 220).

Dalam organisasi sekolah, fungsi uang atau dana di antaranya sebagai penunjang lancarnya kegiatan utama, yaitu melakukan proses pendidikan dan pengajaran. Fungsi yang demikian tersebut tidak berlebihan sebab setiap aktivitas dalam organisasi umum atau organisasi pendidikan berhubungan dengan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah RI, 2005).

### **Tujuan Manajemen Pembiayaan**

Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, semua upaya pemerolehan dana dapat berhasil. Dana yang dimaksud disini antara lain dana dari pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional atau Kantor Dinas Pendidikan Nasional) baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yayasan, dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, tujuan pelaksanaan manajemen pembiayaan adalah untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Pengaturan yang sebaik-baiknya diharapkan semua dana yang ada dan tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bafadal, 2004: 46).

### **Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Setiap lembaga kependidikan khususnya lembaga PAUD, yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta atau yayasan perlu menyertakan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik maupun dana awal yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan (El-khuluqo, 2015: 39). Di samping itu, dalam pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 juga ditegaskan bahwa Pengelolaan pembiayaan harus memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban pada masyarakat (Suyadi, 2014: 20-21). Berikut

pembahasan mengenai prinsip-prinsip tersebut, dengan pembahasan yang lebih detail:

### 1. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orangtua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) bisa ditempel dipapan pengumuman di ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orangtua siswa bisa mengetahui berupa jumlah uang yang diterima sekolah dari orangtua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orangtua siswa terhadap sekolah (Mustari, 2015: 165-166).

### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelajarkan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat (Mustari, 2015: 166).

### 3. Efektifitas

Efektifitas sering kali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kuantitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi kelembagaan. Keefektifitasan itu dicirikan oleh hasil yang berkualitas (*characterized by qualitative outcomes*). Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kuantitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### 4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. "*Efficiency characterized by qualitative outputs*" (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- b. Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (Mustari, 2015: 167).

## Proses Pengelolaan Pembiayaan PAUD

Menurut Depdiknas (2000), manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatusahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan laporan.

### **1. Perencanaan pembiayaan**

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah (E. Mulyasa, 2004: 47). Pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan pengembangan sekolah dalam kurun waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam satu tahun anggaran, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahunan. Perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan pengurus komite sekolah. Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu. Berdasarkan analisis ini, diperoleh banyak kegiatan yang dilakukan sekolah dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun. Oleh karena itu, perlu diurutkan tingkat kebutuhan kegiatan dari yang paling penting sampai kegiatan pendukung yang mungkin bisa ditunda pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan tersedianya waktu, keberadaan tenaga, dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa diupayakan ketersediannya. Akan tetapi, dalam perencanaan keuangan sekolah, terlebih dalam pelaksanaan dan pelaporannya tidak lepas dari prinsip pengelolaan pembiayaan sekolah yang sudah disebutkan seperti keadilan, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik (Minarti, 2016: 223-224).

Sejalan dengan penjelasan di atas, perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis, serta ada tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis pada ramalan yang instutif. Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, artinya perencanaan melalui tahap-tahap kegiatan. Sedangkan, tujuan perencanaan arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Perencanaan pembiayaan mencakup dua kegiatan yang sangat esensial, yaitu sebagai berikut; *pertama*, penyusunan anggaran pembiayaan atau anggaran belanja sekolah (ABS). Hal ini biasanya dikembangkan dalam format yang

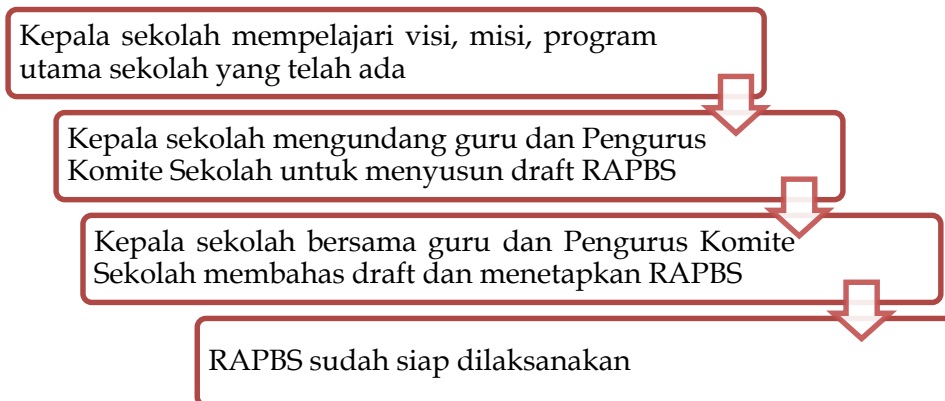
meliputi: 1) sumber pendanaan (uang) yang harus dipertanggungjawabkan. Yakni dana pembangunan pendidikan (DPP), operasi perawatan fasilitas (OPF), dan lain-lain. 2) Pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium, dan kesejahteraan. *Kedua*, Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari point di atas (penyusunan anggaran belanja sekolah) (Minarti, 2016: 228-229).

Dikutip dari Garner (Departemen Pendidikan Nasional, 2007:13), sikuensi perencanaan keuangan yang strategis, yakni sebagai berikut: Misi (*mission*); 2) Jangka panjang (*goal*); 3) Tujuan jangka pendek (*objectives*); 4) Program, layanan, aktivitas (*programs, services, activities*), tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah (*sit based, unit goals, objectives*); 5) Target: baik *outcome* maupun *output*. 6) Anggaran (*Budget*); 7) Perencanaan keuangan yang strategis; (*strategic financial plan*) (Maman dan Asih, 2016: 186).

Analisis sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaannya ini sering menghasilkan apa yang dinamakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan yang lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan (Minarti, 2015: 231).

Selama penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kemudian kepala sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah, dan pengurus komite sekolah merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Proses penyusunan RAPBS yang partisipasif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.





**Gambar 1. Proses Penyusunan RAPBS yang Partisipatif**

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) harus berdasarkan rencana pengembangan lembaga dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPB meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, peningkatan mutu pendidik, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPB harus melibatkan pengelola, pendidik, dan orangtua. RAPB perlu disusun pada setiap tahun ajaran dengan memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal (Sutarman dan Asih, 2016: 190). Prinsip penyusunan RAPB, antara lain: a) Memfokuskan peningkatan belajar murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan; b) Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah; c) Memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah; Adapun proses penyusunan RAPB, antara lain: 1) Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah; 2) Menghimpun, merangkum, dan mengumpulkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya; 3) Menyelesaikan analisis kebutuhan; 4) Memprioritaskan kebutuhan; 5) Mengkonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah; 6) Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan; 7) Menggambarkan perincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya); 8) Mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

Secara rinci langkah penyusunan RAPBS diantaranya; (1) Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun pembangunan atau pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah

maupun komite sekolah. (2) Inventarisasi sumber pembiayaan baik rutin maupun pengembangan. (3) Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS).

## **2. Pelaksanaan atau Penggunaan Pembiayaan PAUD**

Persoalan yang menyangkut keuangan PAUD pada garis besarnya berkisar pada: SPP, transportasi pendidik, kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan pendidik, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggara PAUD, seperti perbaikan sarana dan sebagainya. Dibutuhkan kreativitas kepala sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dengan jalan menggali sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan yang berlaku (Sutarman dan Asih, 2016: 195-196). Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, dan sebagainya (Sutarman dan Asih, 2016: 239).

### **a. Sumber-sumber Keuangan PAUD**

Pengelola sekolah perlu mengusahakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber pendanaan sekolah yang dikelompokkan menjadi 6 sumber dana: Sumber Dana Pemerintah (Pusat dan Daerah); Sumber Dana Usaha Mandiri Sekolah; Sumber Dana Orangtua Peserta Didik; Sumber Dana Dunia Usaha dan Industri; Sumber Dana Masyarakat; Sumber Dana Yayasan. Semakin banyak sumber-sumber keuangan tersebut yang dapat dimanfaatkan sekolah, maka akan semakin baik bagi keberlangsungan, pertumbuhan, dan perkembangan sekolah itu sendiri. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut (Mukminin, 2011):

#### **1) Dana dari Pemerintah**

Dana dari pemerintah disediakan melalui Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah di dalam DIK, biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II, dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-

benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

Data yang dijang telah ditemukan bahwa dana dari Pemerintah (Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI) dan dari pemerintah provinsi (dinas pendidikan provintis) diberikan langsung ke lembaga-lembaga PAUD. Alokasi bantuan dana dari perintah tersebut belum meata dan masih relatif kecil, karna keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penganggaran bidang pendidikan terutama PAUD. Jenis yang dianggarkan meliputi dana rintisan, dana penguatan, dana kelembagaan, pengadaan sarana dan prasarana, intensif tutor/pendidik, PAUD percontohan, dan dana kemitraan. Untuk memperoleh dana tersebut, lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

## 2) Dana dari Orangtua Siswa

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orangtua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas: (a) Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. (b) Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayaran yang dapat diangsur). (c) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orangtua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

## 3) Dana dari Masyarakat

Masyarakat menjadi komponen penting dalam pendanaan sekolah karena mereka memiliki potensi untuk memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah. Misalnya biasanya mudah dimobilisasi oleh para tokohnya (pemimpin informal). Misalnya, di suatu daerah ada ulama yang disegani, masyarakat cenderung akan mudah mengikuti atau melaksanakan tugas dari ulama tersebut. Jika pengelola sekolah mampu menarik tokoh ulama menjadi bagian dari pendukung sekolah, penggalangan dana masyarakat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan reputasi sekolah dalam mengelola dana bantuan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pengelola sekolah, antara lain sebagai berikut: (a) Mengumpulkan testimoni peserta didik, guru, dan karyawan terkait dengan bantuan yang diterima sekolah. (b)

Memberikan pelayanan yang baik bagi para pendonor, seperti memberikan ucapan terima kasih, menjawab segala bentuk pertanyaan, dan memberikan perkembangan terkini mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung. (c) Mengusahakan agar sekolah masuk media sesering mungkin. Semakin sering sekolah diliput oleh media, semakin banyak uang yang dapat dikumpulkan. Melalui media maka banyak orang yang tahu mengenai kondisi sekolah. (d) Siapkan rekening sebagai wadah penyaluran bantuan dalam bentuk uang. (e) Mintalah tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi komite sekolah agar menjadi penyokong terselenggarakannya pendidikan di sekolah (Barnawi dan Arifin, 2012: 47).

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang manruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perseorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta.

#### 4) Dana dari Alumni

Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.

#### 5) Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus ekstra tari, ekstra musik, ekstra *drum band*, ekstra menggambar atau kegiatan-kegiatan ekstra lainnya. Adapun di PAUD dapat dihasilkan dari program *Full Day School* seperti kegiatan TPA (Tempat Penitipan Anak).

#### 6) Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

Terdapat beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh

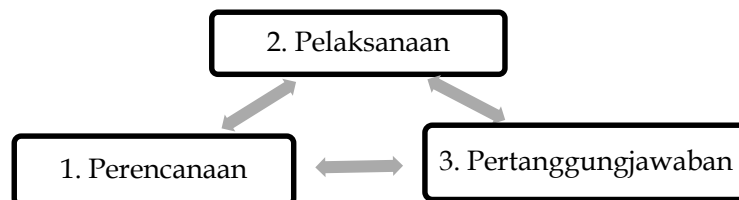
staf sekolah misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotocopi, pengelolaan jasa antar jemput siswa, panen kebun sekolah, kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberikan dana, dan kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya dengan dana dari peserta yang disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah.

7) Pemanfaatan Sumber Dana Yayasan

Sekolah swasta biasanya bernaung di sebuah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan berasal dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. Yayasan yang menaungi sekolah-sekolah berkewajiban untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut (Barnawi dan Arifin, 2012: 47).

#### D. PEMBAHASAN

Secara umum manajemen pembiayaan yang sudah dideskripsikan di atas sebagian besar sesuai dengan manajemen yang ada di PAUD nDasari Budi Krpyak Yogyakarta. Dimana manajemen pembiayaan di PAUD tersebut melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dapat dilihat pada gambar berikut:



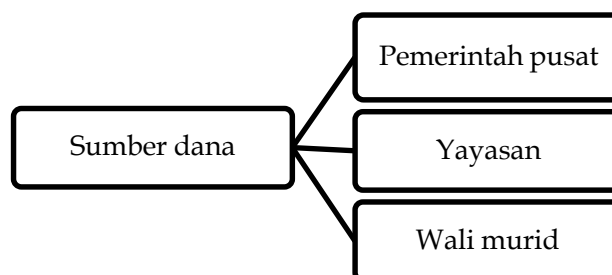
**Gambar 2. Tahapan manajemen pembiayaan di PAUD nDasari Budi Yogyakarta**

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa PAUD nDasari Budi Krpyak Yogyakarta melakukan tiga tahapan dalam manajemen pembiayaan, diantaranya: *pertama* perencanaan. Pada tahap ini PAUD nDasari Budi menganalisis kebutuhan pengembangan sekolah dalam kurun waktu tertentu atau menyusun secara komprehensif rencana pendapatan dan pembelanjaan satu tahun. Perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan pengurus komite

sekolah. Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu.

*Kedua*, pelaksanaan. Pada tahap ini PAUD nDasari Budi melakukan pembelian dan pengeluaran uang yang sesuai dengan rencana anggaran tahunan. Pembelian dan pengeluaran tersebut dilengkapi dengan kwitansi sebagai bukti. Selanjutnya melakukan pembukuan agar dapat diketahui jalannya pembiayaan pada PAUD tersebut. Adapun orang yang terlibat dalam tugas pembiyaan adalah kepala sekolah dan bendaharawan. Kepala sekolah memiliki wewenang untuk memerintah pembayaran yang telah disepakati dan memantau pembiayaan. Sedangkan bendaharawan yang memegang dana sekolah. Kemudian melakukan penerimaan dan pengeluaran dana atau surat berharga yang berkaitan dengan uang, melakukan pembukuan keuangan dan kwitansi sebagai bukti. Setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban. *Ketiga*, pertanggungjawaban. PAUD nDasari Budi pada tahap ini membuat laporan pertanggungjawaban dari hasil penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan secara rutin sesuai pertauran yang berlaku.

Sejalan dengan penjelasan di atas, adanya dana tersebut tentu berasal dari beberapa sumber. Adapun sumber dana di PAUD nDasari Budi berasal dari tiga sumber, yaitu pemerintah pusat, yayasan dan pribadi atau wali murid. Adapun sumber dana yang berasal dari yayasan diterima setiap satu bulan sekali dan diberlakukan kepada semua pengurus yayasan. Selanjutnya dana pribadi, merupakan dana yang berasal dari wali murid seperti uang pendaftaran dan SPP. Sementara itu, bendaharawan menyatakan bahwa PAUD nDasari Budi belum pernah mendapat atau bekerjasama dengan instansi atau usaha bisnis dan dapat dilihat pada bagan berikut,



**Gambar 3. Sumber dana PAUD nDasari Budi Krapyak Yogyakarta**

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber dana tetap yang ada di PAUD nDasari Budi Krapyak Yogyakarta ada tiga, yaitu pemerintah pusat, yayasan, dan wali murid.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di atas dapat diketahui, bahwa faktor pembiayaan sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini sebagai akar keberhasilan pendidikan tahap selanjutnya, salah satunya pembiayaan di PAUD nDasari Budi Krapyak Yogyakarta. Adapun manajemen pembiayaan di PAUD nDasari budi melalui tiga tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan atau penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, PAUD memiliki tiga sumber dana diantara; *pertama*, pemerintah pusat. *Kedua*, yayasan. Melalui yayasan dana didapatkan selama satu bulan sekali dari semua pengurus yayasan. *Ketiga*, dana pribadi (wali murid), merupakan dana yang berasal dari uang pendaftaran dan SPP anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. 2014. *Dasar-dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Barnawi dan Mohammad Arifin. 2012. *Buku Pintar Mengelola Sekolah Swasta*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- El-Khuluqo, Ihsan. 2015. *Manajmen Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idochi Anwar, Moch. 2013. *Administrasi pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Minarti, Sri. 2016. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mukminin, Amirul. 2011. *Bahan Ajar Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2011*, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mustari, Mohamad. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Nurdin, Diding dan Imam Sibaweh. 2016. *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 58 Tahun 2014 Bab X Tentang Standar Pembiayaan Pasal 37
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indoensia Nomor 137 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Repubkik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 12.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R n D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman, Maman dan Asih. 2016. *Manajemen Pendidkkan Usia Dini Filosofi, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suyadi. 2012. *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA Mendirikan, Mengelola dan Mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Dosen Universitas Pendidikan Indonesia. 2013. *Manajemen Pendidikan,.* Bandung: Alfabeta.